



Implementasi Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas PUPR Kota Serang

Fatimah Azzahra¹, Laeli Nur Khanifah², Annisa Permata Ali³, Ashilah Nailah Hasna⁴, Irene Cantika Siahaan⁵, Reisy Ayudia Putri⁶

¹⁻⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author's e-mail : fatimahazahraserang18@gmail.com, Khanifah92@untirta.ac.id, annisamtt@gmail.com, ashilaahn@gmail.com, cantikairene9@gmail.com, reisyayudia688@gmail.com

e-ISSN : 0000-0000

Article Info

Article history:

Received June 18, 2026
Approved July 04, 2026

Keywords:

Value for Money, pengadaan barang dan jasa, ekonomis, efisiensi, efektivitas, Dinas PUPR Kota Serang.

ABSTRAK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama Value for Money, yaitu ekonomis (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Value for Money di Dinas PUPR Kota Serang telah berjalan cukup baik. Pada aspek ekonomis, instansi menerapkan survei pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta negosiasi harga untuk memperoleh nilai terbaik tanpa mengurangi kualitas. Pada aspek efisiensi, penggunaan sistem elektronik seperti SPSE, SiRUP, dan e-Katalog mampu meningkatkan transparansi serta menghemat waktu dan biaya administrasi. Sementara itu, pada aspek efektivitas, sebagian besar target pembangunan infrastruktur telah tercapai meskipun masih ditemukan beberapa kendala terkait kualitas hasil pekerjaan dan keberlanjutan manfaat infrastruktur. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan perencanaan, lemahnya pengawasan teknis, kondisi geografis, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kinerja untuk mengoptimalkan penerapan Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

ABSTRACT

Abstract : This study aims to analyze the implementation of the Value for Money principle in government procurement of goods and services at the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Serang City and to identify the factors influencing its implementation. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed based on the three main dimensions of Value for Money: economy, efficiency, and

effectiveness. The findings indicate that the implementation of the Value for Money principle at the Serang City PUPR Office has been carried out fairly well. In terms of economy, the agency conducts market surveys, prepares the Owner's Cost Estimate (HPS), and negotiates prices to obtain the best value without compromising quality. Regarding efficiency, the utilization of electronic procurement systems such as SPSE, SiRUP, and e-Catalog has improved transparency while reducing administrative time and costs. In terms of effectiveness, most infrastructure development targets have been achieved, although several challenges remain related to work quality and the sustainability of infrastructure benefits. Supporting factors include leadership commitment, the implementation of the Government Internal Control System (SPIP), competent human resources, and the use of information technology. Meanwhile, inhibiting factors include limitations in planning, weak technical supervision, geographical conditions, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, strengthening planning, supervision, and performance-based evaluation is essential to optimize the implementation of Value for Money in government procurement activities.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui proses pengadaan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, barang, dan layanan publik. Besarnya anggaran yang dikelola menjadikan sektor pengadaan sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan pengadaan yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas penggunaan anggaran publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2021).

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengedepankan prinsip Value for Money (VfM), yaitu memastikan setiap pengeluaran anggaran mampu menghasilkan manfaat yang optimal. Konsep ini terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu ekonomis (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness). Aspek ekonomis menekankan perolehan input dengan biaya yang wajar tanpa mengurangi kualitas, efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimal, sedangkan efektivitas mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Penerapan prinsip tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pengadaan tidak hanya berorientasi pada harga termurah, tetapi juga pada kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan penyedia yang tepat (Palar et al., 2021).

Meskipun regulasi telah mengalami berbagai penyempurnaan, implementasi prinsip Value for Money masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area yang paling rentan terhadap praktik korupsi dengan tingkat risiko penyalahgunaan yang sangat tinggi pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (KPK, 2025). Selain itu, data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (ICW & Transparency International Indonesia, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

dalam pengadaan belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur. Tingginya nilai kontrak pengadaan yang dikelola menjadikan implementasi prinsip Value for Money di instansi ini sangat menentukan kualitas layanan infrastruktur yang diterima masyarakat. Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan Value for Money pada instansi teknis daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas PUPR Kota Serang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (Dwiyanto et al., 2021; LKPP, 2025).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk menganalisis implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas PUPR Kota Serang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengalaman, pandangan, serta interpretasi para informan yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai aspek yang memengaruhi penerapan prinsip ekonomis (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness) dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian kualitatif juga dinilai tepat untuk memahami fenomena sosial dan organisasi secara kontekstual melalui pemanfaatan berbagai sumber data yang relevan (Merriam & Tisdell, 2021; Yin, 2023).

Metode studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas PUPR Kota Serang, yang dipandang sebagai suatu kasus dengan batasan yang jelas dari segi lokasi, aktor, dan aktivitas yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip Value for Money serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya dalam konteks nyata. Studi kasus memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai praktik pengelolaan anggaran publik yang berorientasi pada nilai, efisiensi, dan efektivitas kinerja organisasi (Yin, 2023; Rashid et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kota Serang

Implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan sektor publik. Konsep ini menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus mampu menghasilkan manfaat yang optimal melalui penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Mardiasmo (2018), Value for Money merupakan pendekatan pengukuran kinerja sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu economy, efficiency, dan effectiveness. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia. Oleh karena itu, penerapan Value for Money

menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengadaan yang akuntabel serta berorientasi pada hasil (Mardiasmo, 2018; Palar, Solechan, & Wibawa, 2021). (LKPP, 2022; BPKP, 2023; Kemenkeu RI, 2021)

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Serang menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip Value for Money sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengadaan diawali dengan penyusunan kebutuhan berdasarkan kebutuhan riil organisasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Setelah anggaran ditetapkan, dilakukan pemaketan pekerjaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan penyedia melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maupun E-Katalog. Setelah penyedia ditetapkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga serah terima pekerjaan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (LKPP, 2023; BPKP, 2022)

Penerapan prinsip Value for Money juga terlihat dari upaya organisasi dalam memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dinas PUPR Kota Serang terlebih dahulu melakukan survei pasar untuk memperoleh informasi harga yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, dilakukan evaluasi serta negosiasi harga dengan penyedia guna memperoleh harga yang wajar tanpa mengurangi kualitas maupun spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan. Langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek nilai manfaat dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto et al. (2021) yang menyatakan bahwa pencapaian Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola proses pengadaan secara profesional sehingga penggunaan sumber daya dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi organisasi. (BPKP, 2022; LKPP, 2021)

Selain aspek pengendalian biaya, implementasi Value for Money di Dinas PUPR Kota Serang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan. Penggunaan SPSE dan E-Katalog memungkinkan proses pengadaan dilaksanakan secara lebih transparan, terbuka, dan akuntabel karena seluruh tahapan dapat dipantau melalui sistem elektronik. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan sistem elektronik juga membantu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya administrasi karena sebagian besar proses pengadaan dilakukan secara digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Palar et al. (2021) yang menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengadaan pemerintah mampu memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi proses, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. (LKPP, 2023; OECD, 2022)

Keberhasilan implementasi Value for Money tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memastikan bahwa hasil pengadaan mampu mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas PUPR Kota Serang melakukan pengawasan terhadap mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan selama pelaksanaan kontrak serta melaksanakan pemeriksaan sebelum proses serah terima pekerjaan dilakukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian atau pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga kualitas hasil pengadaan agar

tetap sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. (BPKP, 2023; Kemenkeu RI, 2022)

a. Economy (Ekonomis)

Prinsip ekonomis (economy) merupakan salah satu unsur utama dalam konsep Value for Money yang menekankan kemampuan organisasi memperoleh sumber daya dengan biaya yang wajar tanpa mengurangi kualitas yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), aspek ekonomis berkaitan dengan upaya memperoleh input pada tingkat biaya yang paling rasional dengan tetap mempertimbangkan mutu dan spesifikasi yang dibutuhkan. (LKPP, 2022; BPKP, 2023) Berdasarkan hasil wawancara, Dinas PUPR Kota Serang menerapkan prinsip ekonomis sejak tahap perencanaan kebutuhan pengadaan. (Kemenkeu RI, 2021)

Selain melakukan survei pasar, Dinas PUPR Kota Serang juga melakukan evaluasi serta negosiasi harga dengan penyedia barang dan jasa. (LKPP, 2023) Berdasarkan temuan penelitian, penerapan prinsip ekonomis dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Serang dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. (BPKP, 2022; OECD, 2023)

b. Efficiency (Efisiensi)

Efisiensi dalam konsep Value for Money merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia guna mencapai output maksimal dengan input yang minimal. (Mardiasmo, 2018; LKPP, 2023) Berdasarkan hasil penelitian, implementasi efisiensi di Dinas PUPR Kota Serang diukur melalui rasio antara realisasi belanja dengan output kegiatan yang dihasilkan. (BPKP, 2023) Salah satu bentuk konkret efisiensi yang diterapkan Dinas PUPR Kota Serang adalah melalui mekanisme lelang terbuka pada pengadaan barang dan jasa. (LKPP, 2022) efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Serang tidak hanya diwujudkan melalui penghematan anggaran, tetapi juga melalui pengelolaan proses pengadaan yang lebih cepat dan transparan (OECD, 2022; Kemenkeu RI, 2021) Meskipun demikian, efisiensi Dinas PUPR Kota Serang tidak sepenuhnya berjalan optimal. (BPKP, 2023)

c. Effectiveness (Efektivitas)

Efektivitas merupakan dimensi ketiga dalam kerangka Value for Money yang mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program atau kegiatan pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. (Mardiasmo, 2018; OECD, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kegiatan Dinas PUPR Kota Serang telah mencapai efektivitas yang memadai dalam hal pemenuhan target fisik. (BPKP, 2022) Evaluasi efektivitas juga dapat dilihat dari perspektif kepuasan masyarakat. (Kemenkeu RI, 2022) Secara keseluruhan, implementasi efektivitas di Dinas PUPR Kota Serang dapat dikategorikan cukup baik pada tataran output. (OECD, 2023; BPKP, 2023)

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Value for Money

1. Faktor Pendukung

Implementasi Value for Money di Dinas PUPR Kota Serang tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mendukung keberhasilannya. Faktor-faktor ini menciptakan

kondisi yang kondusif bagi pengelolaan keuangan yang hemat, efisien, dan efektif dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kota.

Pertama, komitmen pimpinan terhadap tata kelola keuangan yang baik menjadi faktor pendukung yang paling fundamental. Kepemimpinan yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi mendorong seluruh jajaran aparatur untuk bekerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang sehat. Menurut Pratolo et al. (2020), komitmen pimpinan merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip Value for Money pada instansi pemerintah daerah, karena pimpinan memiliki otoritas untuk membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.

Kedua, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai turut menjadi faktor pendukung penting. SPIP memberikan kerangka pengendalian yang terstruktur sehingga setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dapat diawasi secara sistematis (Sumarjo, 2020). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, implementasi SPIP yang baik dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan pemborosan anggaran yang pada gilirannya mendukung tercapainya prinsip ekonomis dan efisiensi (Sumarjo, 2020).

Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pengadaan elektronik. Penggunaan aplikasi SIRUP, e-katalog, dan SPSE memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan. Sistem elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses dapat ditelusuri dan diawasi oleh berbagai pihak (Wijayanti & Hanafi, 2021).

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknis dan keuangan juga turut mendukung implementasi Value for Money. Staf yang memiliki kapasitas dalam perencanaan teknis, estimasi anggaran, pengawasan lapangan, dan pelaporan keuangan akan menghasilkan kualitas output yang lebih baik dengan penggunaan anggaran yang lebih terkontrol. Rosmawati (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi SDM aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada nilai.

Keempat, penggunaan sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis teknologi, seperti SIMDA dan SIPD, membantu Dinas PUPR Kota Serang dalam mengelola data anggaran secara real-time dan transparan (Hanafi & Wijayanti, 2021). Sistem ini memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara berkala sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini. Menurut Wijayanti dan Hanafi (2021), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti meningkatkan akurasi data, kecepatan pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran secara keseluruhan.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor yang menghambat implementasi Value for Money di Dinas PUPR Kota Serang. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan langkah perbaikan yang tepat sasaran.

Pertama, keterbatasan kapasitas perencanaan menjadi hambatan yang paling sering diidentifikasi. Perencanaan anggaran yang tidak matang dan tidak berbasis data kebutuhan yang akurat menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak tepat guna. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemborosan di satu sisi dan kekurangan anggaran di sisi lain untuk kegiatan yang benar-benar prioritas (Syahputra & Zamzami, 2021).

Kedua, rendahnya kualitas pengawasan lapangan turut menghambat pencapaian Value for Money. Keterbatasan jumlah personel pengawas teknis dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diawasi menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kualitas pelaksanaan konstruksi. Akibatnya, beberapa pekerjaan fisik tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, sehingga output yang dihasilkan tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan (Bastian, 2021).

Ketiga, faktor eksternal berupa kondisi geografis dan cuaca juga menjadi penghambat yang sulit dikendalikan. Wilayah Kota Serang dengan karakteristik curah hujan tinggi dan kondisi tanah tertentu kerap menyebabkan kerusakan infrastruktur yang baru saja selesai dibangun, sehingga mengurangi umur manfaat dan nilai ekonomis dari investasi yang dilakukan (Wibowo & Nasution, 2021).

Keempat, lemahnya koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun oleh Dinas PUPR seringkali rusak atau terganggu akibat pekerjaan galian yang dilakukan oleh instansi lain tanpa koordinasi yang baik. Kondisi ini mengakibatkan pemborosan anggaran karena pekerjaan harus dilakukan ulang. Menurut Halim dan Kusufi (2020), koordinasi antar-SKPD yang lemah merupakan salah satu patologi birokrasi yang secara langsung berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik.

Upaya Dinas PUPR Kota Serang dalam Mengoptimalkan Implementasi Value for Money

Menyadari berbagai hambatan yang ada, Dinas PUPR Kota Serang telah dan terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi Value for Money dalam pengelolaan anggarannya. Upaya-upaya tersebut mencakup dimensi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja (Mahmudi, 2019; Pratolo et al., 2020).

Pertama, penguatan kualitas perencanaan kegiatan melalui pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dinas PUPR Kota Serang mulai menerapkan sistem prioritas kebutuhan infrastruktur berdasarkan survei kondisi lapangan dan masukan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa anggaran yang terbatas dialokasikan pada kegiatan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak terbesar. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2019), perencanaan berbasis kebutuhan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan anggaran yang ekonomis dan efektif sekaligus (Mahmudi, 2019).

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial. Aparatur Dinas PUPR Kota Serang secara berkala mengikuti bimbingan teknis terkait pengadaan barang dan jasa, manajemen proyek, serta pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan meningkatkan kompetensi staf dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan secara lebih efisien. Rosmawati (2022) menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur merupakan strategi jangka panjang yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan berbasis kinerja (Rosmawati, 2022).

Ketiga, penguatan fungsi pengawasan internal melalui optimalisasi peran Inspektorat Daerah dan pengawas lapangan. Dinas PUPR Kota Serang berupaya meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk penggunaan checklist mutu pekerjaan dan dokumentasi progres fisik secara berkala. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat menekan risiko penyimpangan spesifikasi teknis yang selama ini menjadi sumber pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas output infrastruktur (Sumarjo, 2020; Bastian, 2021).

Keempat, peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu agenda strategis yang terus didorong oleh Dinas PUPR Kota Serang. Dalam kerangka koordinasi ini, Dinas PUPR berupaya membangun forum komunikasi antar-SKPD untuk mensinkronkan jadwal dan lokasi pekerjaan infrastruktur, sehingga kerusakan akibat penggalian lintas sektor dapat diminimalisir. Menurut Pratolo et al. (2020), sinkronisasi program antar unit kerja pemerintah daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan Value for Money karena mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan pemborosan sumber daya publik (Pratolo et al., 2020).

Kelima, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Kota Serang mulai mengembangkan indikator kinerja utama (IKU) yang tidak hanya mengukur realisasi anggaran dan output fisik, tetapi juga mencakup dimensi outcome seperti tingkat kepuasan masyarakat dan umur teknis infrastruktur yang dibangun. Kurrohman (2021) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja yang berorientasi pada outcome merupakan instrumen kritis untuk memastikan bahwa implementasi Value for Money tidak hanya berhenti pada tataran prosedural, tetapi benar-benar menghasilkan nilai nyata bagi publik (Kurrohman, 2021).

Dengan langkah-langkah optimalisasi ini, Dinas PUPR Kota Serang menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas PUPR Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Value for Money yang meliputi aspek ekonomis (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness) telah dilaksanakan dengan cukup baik, di mana pada aspek ekonomis Dinas PUPR Kota Serang menerapkan perencanaan kebutuhan berdasarkan kondisi riil organisasi, melakukan survei pasar sebelum penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta melaksanakan negosiasi harga dengan penyedia guna memperoleh harga yang wajar tanpa mengurangi kualitas dan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan biaya; berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yaitu pertama, bagi Dinas PUPR Kota Serang perlu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan melalui pemanfaatan data yang lebih akurat dan komprehensif sehingga kebutuhan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan prioritas pembangunan daerah karena perencanaan yang matang akan membantu meminimalkan perubahan kegiatan serta mengurangi potensi pemborosan anggaran; kedua, penguatan fungsi pengawasan perlu terus dilakukan baik melalui peningkatan jumlah maupun kompetensi tenaga pengawas teknis agar pengawasan yang optimal dapat memastikan kesesuaian mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan; ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi karena kompetensi aparatur yang memadai akan mendukung pelaksanaan pengadaan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada prinsip Value for Money; keempat, koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan infrastruktur yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran sehingga sinkronisasi program dan jadwal kegiatan antarperangkat daerah menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan; dan kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, misalnya

membandingkan implementasi Value for Money pada beberapa organisasi perangkat daerah atau menggunakan metode campuran (mixed methods) sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip Value for Money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2021). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 4). Erlangga.
- Dwiyanto, A., et al. (2021). Pengaruh implementasi model kematangan terhadap pencapaian value for money untuk efisiensi pengadaan barang/jasa: Studi kasus unit kerja pengadaan barang/jasa pada Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1).
<https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol17/iss1/12/>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah (Edisi 2). Salemba Empat.
- ICW & Transparency International Indonesia. (2025, Juni). Perpres PBJ 2025: Formalitas pemberantasan korupsi pengadaan. Indonesia Corruption Watch.
<https://antikorupsi.org/id/perpres-pbj-2025-formalitas-pemberantasan-korupsi-pengadaan>
- Inspektorat Kabupaten Serang. (2022). Pengadaan barang dan jasa.
<https://inspektorat.serangkab.go.id/baca/berita/pengadaan-barang-dan-jasa>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Value for money (VfM). Direktorat KPBU Kementerian Keuangan.
<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm>
- Kompas. (2025, 5 Maret). Pengadaan barang jasa pemerintah dapat rapor merah pencegahan korupsi. <https://www.kompas.id/artikel/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-dapat-rapor-merah-pencegahan-korupsi>
- KPK. (2025, 22 Januari). Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>
- Kurrohman, T. (2021). Pengukuran kinerja pemerintah daerah berbasis outcome: Kajian teoritis dan empiris. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 6(2), 1012–1029.
<https://doi.org/10.31093/jraba.v6i2.273>
- LKPP. (2025, 10 Maret). Cegah korupsi dan kecurangan, LKPP dorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
<https://www.lkpp.go.id/read/bu/cegah-korupsi-dan-kecurangan-lkpp-dorong-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>
- Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi 3). UPP STIM YKPN.
- Palar, V. P. M., Solechan, & Wibawa, K. C. S. (2021). Penerapan prinsip value for money dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Universitas Diponegoro Repository.
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9797/>
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Riyanto, B. E. (2020). Determinan efektivitas penerapan value for money pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art1>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Negara.
- Rosmawati, R. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(1), 145–156.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1154>
- Syahputra, R., & Zamzami, F. (2021). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(1), 118–134. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07>
- Wijayanti, R., & Hanafi, R. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 11(3), 589–602. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.14821>